E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://epaper.dpr.go.id

Judul : Asa Memulihkan Harmoni
Tanggal : Senin, 14 Februari 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 10

kompas_14_02_22_h.10_asa-memulihkan-harmoni

Asa Memulihkan Harmoni

Warga Wadas yang Terbelah

Harmoni damai tidak kentara dalam kerja bakti di Masjid Al Hidayah, di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Sabtu (12/2/2022). Butuh upaya lebih keras untuk pemulihan kohesi sosial.

Regina Rukmorini

Kerja bakti pengecatan Masjid Al Hidayah di-inisiasi Kodim 0708/Purworejo untuk membangun kembali kohesi sosial warga. Namun, minimnya warga yang bekerja, serta sunyinya obrolan dan canda tawa dari mereka yang terlibat dalam kerja bakti, menjadi bukti kehidupan warga yang sedang tidak baik-baik saja.

Kurang dari 10 warga yang turut dalam kerja bakti. Adapun undangan bagi warga untuk mengikuti kerja bakti baru disampaikan pada Jumat (11/2/2022).

”Karena dilaksanakan pagi, mungkin masih banyak orang yang berhalangan karena harus bertani di ladang,” kata Komandan Koramil 13/Bener, Kapten Infanteri Dhaliman.

Seperti diberitakan sebelumnya, masyarakat di Desa Wadas saat ini terbelah, menjadi kelompok pro dan kontra atas rencana penambangan batu andesit di desa. Penambangan ini rencananya untuk menyuplai material pembangunan Bendungan Bener.

Ketegangan di desa mencapai puncaknya ketika polisi kemudian mengamankan 67 warga kontra penambangan saat mereka sedang melakukan mujahadah di Masjid Nurul Huda, Selasa (8/2/2022).

Komandan Kodim 0708/Purworejo Letnan Kolonel Inf Lukman Hakim mengatakan, situasi yang terjadi saat ini memang tak mudah dihadapi. Pihaknya berupaya membantu pemulihan trauma dan merajut kembali relasi antarwarga, salah satunya lewat kegiatan kerja bakti dengan melibatkan banyak warga.

Dalam kerja bakti di Desa Wadas, pembersihan dan pe-

ngecatan direncanakan dilakukan di masjid, mushala, dan Tempat Pendidikan Al Quran. Semula, kegiatan ini akan melibatkan 50 prajurit TNI, 30 gabungan warga dan pegawai dari Kantor Kecamatan Bener, serta 20 polisi.

Saat kegiatan kerja bakti berlangsung, sejumlah warga tampak asyik dengan aktivitas masing-masing di rumah. Sebagian terlihat duduk-duduk, merokok, dan mengobrol dengan rekan-rekannya. Sejumlah ibu rumah tangga juga terlihat duduk di depan warung penyedia kebutuhan pokok, berbincang dengan ibu lainnya, sembari sesekali mengawasi anak-anaknya bermain. Tidak banyak yang mau terlibat dengan gotong royong di masjid.

Ngadik (40), salah satu warga, enggan menjelaskan alasan tidak bergabung dalam kerja bakti. Dia justru mempersoalkan keberadaan puluhan personel TNI dan polisi di masjid.

”Ada apa lagi? Mau ngapain lagi mereka?” ujarnya, menyiratkan rasa takut.

Pertanyaan serupa juga diungkapkan warga lain, Khamiyati (39). Setelah lega karena seluruh polisi ditarik dari desa pada Jumat (11/2), trauma melingkupinya saat melihat puluhan polisi dan TNI kembali masuk desa.

Sementara Mujiyanto (47), salah satu warga pro penambangan dan ikut dalam kerja bakti, menilai, minimnya keterlibatan warga dalam kerja bakti terjadi karena Masjid Al Hidayah berdiri di tengah permukiman warga kontra.

Secara pribadi, Mujiyanto mengaku keputusannya mendukung rencana pemerintah dengan setuju menjual lahan adalah keputusan yang tepat. Hal itu dilatarbelakangi baginya tidak ada celah alasan untuk menentang program pemerintah.

”Kalau saya menentang, khawatir hal itu nantinya berdampak pada berbagai macam hal lain, misalnya dipersulit saat mengurus administrasi atau semacamnya,” ujarnya.

Trauma

Di sudut lain Desa Wadas, Ngabdul Mukti (29), salah satu warga, mengatakan, saat ini masih banyak warga dibelit trauma dengan keberadaan aparat di desanya. Puluhan warga pun mengungsi dan belum berani pulang ke rumah karena khawatir kejadian penangkapan dan tindakan represif aparat pada Selasa (8/2)

kembali berulang.
Sebagian warga yang ditangkap, diamankan polisi, juga belum bisa merasa tenang karena telepon selular mereka, tanpa alasan jelas, masih disita polisi.
Julian Duwi Prasetia dari Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta mengatakan, pro dan kontra warga terhadap penambangan selama ini tidak pernah berkembang menjadi masalah besar. Namun, insiden Selasa lalu justru menghadirkan trauma dan mengacaukan situasi di desa.
Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Beka Ulung Hapsara mengatakan, pemulihan trauma dan relasi antarwarga adalah hal utama yang harus ditangani pemerintah. Pemulihan jadi kunci utama untuk memecahkan masalah yang terjadi di Desa Wadas.
Penyelesaian konflik di Desa Wadas juga diupayakan Kantor Staf Presiden (KSP). Dikutip dari siaran pers KSP, Minggu (13/2), tim KSP berjalan kaki mendatangi rumah-rumah warga Desa Wadas.
Tim yang dipimpin Tenaga Ahli Utama KSP Joanes Joko itu berupaya mendapatkan informasi menyeluruh terkait kronologi insiden pada 8 Februari 2022 di Desa Wadas. Tim menyerap pendapat warga yang pro dan kontra penambangan untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.
Kini, situasi warga di Wadas memang sedang tidak baik-baik saja. Solusi atas masalah ini dinanti agar kehidupan warga kembali normal. (CAS)